

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Politik Tata Ruang Kabupaten Banyumas: Studi Kasus Pembangunan Perumahan Sapphire Village di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai peran pemerintah daerah dan pengembang dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW. Selain itu, untuk memahami dan mendeskripsikan mengenai faktor pendukung dan penghambat proses relasi antara pemerintah daerah dan pengembang dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW. Metode dari penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau berupa paparan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kompleksitas relasi yang terbentuk antara pemilik modal pada pemerintah daerah atau desa serta masyarakat. Demikian peran Perda No. 10 tahun 2011 yang meliputi fungsi sebagai filterisasi terwujudnya suatu ide terhadap suatu wilayah khususnya di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Baturraden, Desa Rempoah atas terbangunnya sebuah Perumahan Sapphire Village. Peran pemerintah daerah pada pengembang dalam implementasi RTRW menyikapi permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk pembangunan perumahan PT. Sapphire Sukses yang berada di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden tidak sesuai dengan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW bahwa lahan yang dimiliki oleh PT tersebut adalah lahan pertanian yang di rubah alih fungsi menjadi perumahan. Adapun faktor pendukung dan penghambat proses pola penggunaan lahan yang dibangun dengan pola komunikasi antara pemerintah daerah dan pengembang dalam pembangunan perumahan Sapphire Village di Desa Rempoah dalam melindungi lahan pertanian dengan implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW yang bersifat rasionalitas komunikatif.

Kata kunci : Perumahan Sapphire village, Desa Rempoah, Politik Tata Ruang.

SUMMARY

This study entitled "Spatial Politics Banyumas: A Case Study of Housing Development Rempoah Sapphire Village in the Village District of Baturraden". The purpose of this study was to describe the role of local governments and developers in housing construction in Banyumas in accordance with Regulation No. 10 Year 2011 on Spatial. In addition, in order to understand and describe the factors supporting and inhibiting the process of relationship between local government and developers in housing construction in Banyumas in accordance with Regulation No. 10 Year 2011 on Spatial. Methods of research used a qualitative descriptive study, which collected data will be presented in the form of words or form of exposure.

The results of this study is to show the complexity relations formed between the owners of capital in local government or village and community. Thus the role of Perda No. 10 of 2011 which includes the filtering function as the realization of an idea to a particular region in Banyumas, District Baturraden, Rempoah Village on the establishment of a Housing Sapphire Village. The role of local governments in the implementation of Spatial developers in addressing the problems over agricultural land is used for residential development PT. Sapphire Success in the village of Rempoah, District Baturraden not in accordance with the Regulation No. 10 Year 2011 on RTRW that land owned by PT is farmland fox conversion to housing. The factors supporting and inhibiting the process of land use patterns that are built with the pattern of communication between local authorities and developers in housing construction in the village Sapphire Rempoah Village in protecting agricultural land with the implementation of Regulation No. 10 Year 2011 on Spatial nature of communicative rationality.

Keywords: Housing Sapphire village, Rempoah Village, Spatial Politics.